PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAHRUL MULYADI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
3. NHK : **970514**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.180.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/12 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/12 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/14 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/3 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 120.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/3 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 120.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/3 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 83.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF50 SPB Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA GL MAX 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA V1JO2Q32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI

Rp. 28.000.000

5. MOTOR, HONDA L1FO2N37L1 A/T Tahun 2023, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**56.300.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**74.000.873**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.393.300.873**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**175.031.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.218.269.873**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.